

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Bratakusumah, Deddy S, & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamarah, Syaiful Bahri. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Fattah, Nanang. 2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah*. Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Forsyth P. 2009. *Janganlah sia-siakan waktumu*. Yogyakarta : grara ilmu.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta : BPFE
- Hasibuan, Malayu. 2002. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Huda, Ni<sup>matul</sup>. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta : Fh Uii Press.
- Kurniawan, F. Ahmad 2022. *Kuasa akuntan publik dan eksistensi laporan audit simbolik (Bourdiesian persepective), halaman 9*. Malang : Penerbit Paneleh.
- Manullang, 2006, *Dasar-Dasar Manajemen*, edisi revisi, cetakan ketujuh. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Neufeldt, Victoria. 1996. *Webster's New World collage dictionary*. Edisi ketiga, halaman 9. Amerika Serikat : MacMillan.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya : Aditya Media Publishing.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siswanto (2009). *Pengantar Manejemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sujamto. 1986. *Beberapa pengertian dibidang pengawasan*. Jakarta : Ghalia Indah.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung : Alfabeta.

Victor. M.S., dan Jusuf Juhir. 1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta : Rinerke Cipta.

## **B. Peraturan-Peraturan**

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Peengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Tugas Pengguna Anggaran.

Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 31 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupate/Kota.

Kota Makassar Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar

## **C. Skripsi**

Defitri, et al. (2018). *Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Skripsi)*. Kota Solok. Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.

Irawati.B, Nur. (2020). *Pengaruh Pengawasan Inspektorat Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang (Skripsi)*. Makassar. Universitas

Muhammadiyah.

Ningsih, Dessy Nindya. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektort Daerah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pesawaran (Skripsi)*. Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung.

Oktavia, Rina Diah. (2019). *Peran Inspektorat Sebagai Quality Assurance Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember (Skripsi)*. Jember. Universitas Jember.

Priyatun, lis. (2018). *Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Tesis)*. Lampung. Universitas Lampung Bandar Lampung.

#### **D. Jurnal**

Isnanniasa, Naim Salpin, and Prasetyono Prasetyono. 2020 "Determinan Kualitas Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.8, No.3 : 519-530.

#### **D. Lain-lain**

Makassar Kota. 2021. Kota Makassar Raih Nilai SAKIP dan RB Tertinggi di Sulsel Tiga Tahun Berturut-turut. <https://makassarkota.go.id/kota-makassar-raih-nilai-sakip-dan-rb-tertinggi-di-sulsel-tiga-tahun-berturut-turut/>

Rakyat Sulsel. 2021. Tindak Lanjut Temuan LHP Plt Inspektorat Daerah Kota Makassar. <https://rakyatsulsel.co/2021/08/19/soal-tindak-lanjut-temuan-lhp-bpk-rp395-miliar-plt-inspektorat-makassar-irit-bicara/>